

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur

Jalindra Valen Assa¹, Jetty J. Mokat^{2✉} Fitri Mamonto^{3✉}

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

Abstrak

Pendidikan ialah suatu hal yang dinilai sangat penting dan harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, model pembelajaran pada pendidikan di suatu negara terus mengalami perubahan tergantung pada kebutuhannya. Dalam hal ini, salah satu konsep pembelajaran yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan penerapan kebijakan merdeka belajar. Sejauh ini, instansi pendidikan yang telah banyak menerapkan kebijakan merdeka belajar yaitu Sekolah Dasar (SD). Sehingga, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan merdeka belajar pada SD di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur dan apa saja kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar yang dilakukan pada SD di Bolang Mangodow Timur telah berjalan dengan baik, yang mana dalam penerapannya memperhatikan beberapa aspek, seperti: penentuan pola penerapan, melakukan perencanaan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar, dan peningkatan kreativitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Kata Kunci: Pendidikan, Merdeka Belajar, Sekolah Dasar (SD)

Copyright (c) 2025 Jalindra Valen Assa

✉ Corresponding author :

Email Address : jalindravalen@gmail.com

PENDAHULUAN

Akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia menyebabkan banyak aspek terdampak. Salah satunya di bidang pendidikan, akibat Covid-19 maka proses pembelajaran di instansi pendidikan harus berubah. Melalui Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Kebijakan Pendidikan Darurat terhadap Penyebaran Virus Corona. Kebijakan ini mengatur terkait penyelenggaraan pembelajaran yang dapat dilakukan di rumah atau jarak jauh, hal tersebut bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 yang ada di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Secara lebih lanjut, untuk menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada. Kemudian, Kemendikbud menerapkan konsep merdeka belajar yang dinilai lebih efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran di instansi pendidikan sekarang ini. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mendikbud No. 3 tahun 2020 yang menyatakan bahwa kebijakan merdeka belajar dinilai dapat mendorong proses

pembelajaran siswa menjadi lebih efisien, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah wawasan dan kompetensi yang ada dalam dirinya sesuai minat.

Salah satu instansi pendidikan yang telah menerapkan kebijakan merdeka belajar yaitu Sekolah Dasar (SD). Menurut pendapat (Baharuddin, 2021) disebutkan bahwa tiap SD yang ingin menerapkan konsep merdeka belajar untuk proses pembelajarannya diharuskan untuk memperhatikan beberapa aspek. Hal tersebut bertujuan supaya konsep merdeka belajar yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pengetahuan siswanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendikbud menunjukkan bahwa kebijakan merdeka belajar ini seharusnya telah dilaksanakan oleh seluruh instansi pendidikan yang ada di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sejauh ini, Sekolah Dasar menjadi satuan pendidikan yang telah menerapkan kebijakan merdeka belajar dalam proses pembelajarannya yaitu sebanyak 84.034 SD di Indonesia. Sedangkan, di Sulawesi Utara sendiri diketahui terdapat 463 instansi pendidikan yang telah menerapkan kebijakan merdeka belajar.

Menurut data yang diperoleh penulis diketahui bahwa seharusnya sebanyak 77 Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur yang telah menerapkan kebijakan merdeka belajar. Akan tetapi, berdasarkan pernyataan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mangodow Timur diketahui hanya 5 Sekolah Dasar yang telah melaksanakan kebijakan merdeka belajar secara maksimal. Dalam jurnalnya (Manik, 2022) berpendapat bahwa untuk melaksanakan kebijakan merdeka belajar di Sekolah Dasar, maka instansi terkait juga harus mempersiapkan sumber daya manusianya dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat mendorong implementasi kebijakan merdeka belajar dapat berjalan dengan optimal.

Implementasi kebijakan merdeka belajar dinilai dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di instansi pendidikan, khususnya Sekolah Dasar (SD). Dengan menggunakan kebijakan merdeka belajar, maka memungkinkan guru dan siswa untuk merumuskan sebuah metode yang dinilai efektif digunakan dalam proses pembelajaran.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan merdeka belajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur didalam menerapkan kebijakan merdeka belajar.

a. Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat Dye dalam (Widodo, 2008) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan suatu hal. Sedangkan, menurut Carl I. Friederick dalam (Nugroho, 2009) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang atau sekelompok orang, yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal yang kaitannya dengan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik ini dinilai sebagai suatu hal yang dirumuskan dan dilaksanakan sebagai tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu,

perumusan hingga pelaksanaan kebijakan publik ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan.

b. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Diketahui bahwa implementasi kebijakan publik menurut (Nawi, 2018) ialah suatu kegiatan yang tujuannya untuk melakukan pembangunan hubungan supaya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, serta dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn. Dalam konsep Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2011) disebutkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dapat dinilai dari 6 variabel, yaitu:

- 1) Adanya variabel standar dan sasaran dari kebijakan yang ditetapkan
- 2) Sumber daya manusia (SDM)
- 3) Karakteristik dari organisasi pelaksananya
- 4) Komunikasi yang dilakukan oleh seluruh organisasi pelaksana
- 5) Sikap dari seluruh pelaksana yang terlibat
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politiknya.

c. Model Implementasi Kebijakan Publik

Diketahui bahwa terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang berguna untuk menganalisis pelaksanaannya. Pemilihan model implementasi kebijakan publik tersebut harus disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan dari kebijakan yang dikaji. Terdapat 3 model implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli, antara lain: model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, model George Edward III, dan model Merille D. Grindle.

d. Sistem Pendidikan

Menurut (Sanjaya, 2011) disebutkan bahwa suatu sistem merupakan kesatuan dari sebuah komponen yang berhubungan atau berkaitan satu sama yang lain, yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan ialah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan ialah suatu konsep yang mengatur terkait landasan-landasan yang digunakan dalam pendidikan sebagai proses dalam mencapai tujuan tertentu.

e. Kebijakan Merdeka Belajar

Konsep merdeka belajar secara umum memiliki tujuan agar tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua dapat memberikan dukungan terkait lingkungan belajar yang bahagia dan mandiri untuk mendorong pencapaian pendidikan secara optimal. Berdasarkan (Syukur, 2020) disebutkan bahwa merdeka belajar merupakan suatu proses dalam pendidikan yang memiliki tujuan supaya tercipta suasana yang

membahagiakan selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga, materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh para siswanya.

Implementasi kebijakan merdeka belajar pada seluruh instansi pendidikan yang ada di Indonesia sendiri diatur dalam Keputusan Mendikbud No. 56/M/2020 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Pada peraturan tersebut juga dijelaskan terkait struktur kurikulum merdeka belajar pada Sekolah Dasar yang terbagi dalam pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

f. Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Disebutkan oleh (Suharjo, 2006) bahwa Sekolah Dasar merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak yang usianya 6 - 12 tahun. Berbeda dengan pemaparan yang ada di UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan Sekolah Dasar dan menengah merupakan salah satu pendidikan formal yang diperuntukkan kepada anak yang usianya 7 - 18 tahun, serta menjadi prasyarat supaya anak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

A. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang sedang terjadi atau sifatnya faktual. Terdapat dua rumusan fokus dalam penelitian ini yaitu terkait implementasi kebijakan publik dengan menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta tantangan apa saja yang dihadapi Sekolah Dasar di Bolaang Mangodow Timur dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui penelitian langsung, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, pengujian validitas datanya dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Ketika ingin menerapkan konsep kebijakan belajar, maka seluruh elemen dalam instansi pendidikan terkait harus memahami pola penerapan yang akan digunakan. Diketahui bahwa pola kebijakan merdeka belajar yang digunakan SD di Bolaang Mangodow Timur yaitu dengan penilaian berdeferensiasi holistic dan bermakna. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu guru SD, sebagai berikut:

"Penerapan kebijakan merdeka belajar di SD yang berada di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur dengan proses pembelajaran berdeferensiasi. Saya sebagai guru dapat melihat tanggapan siswa menjadi lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Dikarenakan, dalam konsep merdeka belajar anak-anak diberikan kesempatan untuk berkreasi dengan bebas, sehingga pembelajaran yang dilakukan betul-betul akan memberikan manfaat. Begitu pun pada guru yang dapat memanager proses pembelajaran sesuai dengan kreativitas tanpa adanya tekanan dari luar yang membuat pembelajaran yang berlangsung juga bermakna."

Pola penerapan kebijakan merdeka belajar dengan pembelajaran dan penilaian berdeferensiasi pada SD di Kabupaten Bolaang Mangodow Tikmur dinilai dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi dengan pikirannya sendiri, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dinilai dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan.

Selanjutnya, sebelum melaksanakan implementasi kebijakan merdeka belajar maka tenaga pendidik juga seharusnya membuat perencanaan terlebih dahulu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan guru SD di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur dilaksanakan dengan menentukan kurikulum darurat terlebih dahulu dan membuat rencana pembelajaran (RPP). Hal tersebut juga seperti yang dikatakan oleh Ibu B selaku salah satu guru SD di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur dalam wawancaranya dengan penulis, berikut ini:

“Kalo merdeka belajar sendiri awalnya dilakukan untuk penerapan RPP, itu sebagai pedoman. Setelah itu, baru kita sebagai guru memikirkan aspek teknik ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kalau anak SD kan masih kecil dan cenderung susah untuk diatur, jadi ada beberapa hal yang biasanya dilakukan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti: melakukan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai, mengabsen kehadiran seluruh siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan garis besar cakupan materi, dan mempersiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran dapat berjalan secara lancar.”

Perencanaan yang dibuat juga termasuk berkaitan dengan tahapan sebelum pembelajaran dilaksanakan, seperti:

- a) Sebelum proses pembelajaran berlangsung, maka guru harus memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu
- b) Melakukan kegiatan absensi siswa
- c) Menyampaikan tujuannya dan manfaat pembelajaran yang akan dilakukan
- d) Memberikan garis besar materi yang akan disampaikan
- e) Menyiapkan alat dan bahan untuk proses pembelajarannya.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara berdeferensiasi menjadi perwujudan dari merdeka belajar yang dinilai mampu meningkatkan kreativitas siswa SD di Bolang Mangodow Timur. Dari hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah SD, diperoleh hasil sebagai berikut:

“Penerapan kebijakan merdeka belajar untuk siswa SD ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar para siswa. Untuk saat ini, kreativitas siswa dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal itu karena dengan penerapan merdeka belajar, maka para siswa lebih mempunyai kemampuan untuk berpikir secara kritis, mempunyai kepekaan terhadap emosi, bakat, dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi.”

Dari hasil wawancara di atas, secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan merdeka belajar dinilai mampu meningkatkan kreativitas siswa di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur, yang meliputi:

- 1) Kemampuan siswa dalam berpikir kritis
- 2) Siswa memiliki kepekaan emosi
- 3) Mengasah bakat yang dalam diri siswa
- 4) Meningkatkan daya imajinasi siswa yang tinggi

Meskipun demikian, proses implementasi kebijakan merdeka belajar pada SD di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur juga mengalami beberapa kendala. Hal tersebut juga disampaikan salah satu kepala sekolah SD melalui wawancara dengan penulis, sebagai berikut:

“Ya namanya ini kan produk baru, jadi dalam pelaksanaannya tidak bisa langsung mulus, guru dan siswa juga sama-sama meraba mana yang dinilai bisa diterapkan dengan nyaman selama proses pembelajaran. Selama penerapan kebijakan merdeka belajar pada SD di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, juga diketahui masih banyak kendala-kendala yang perlu dihadapi oleh tenaga pendidik dan peserta didik.”

Diketahui bahwa beberapa kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran, yaitu:

- 1) Perencanaan yang belum dibuat guru secara tepat
- 2) Belum adanya sistem penilaian yang akurat untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran dengan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar
- 3) Bebasnya proses pembelajaran membuat guru kerepotan mengatur para siswanya
- 4) Siswa yang kesusahan beradaptasi dengan penerapan konsep merdeka belajar
- 5) Banyak siswa yang merasa tertinggal selama proses pembelajaran.

b. Pembahasan

Implementasi kebijakan merdeka belajar pada SD di Bolaang Mangodow Timur dilaksanakan dengan pembelajaran dan penilaian berdeferensiasi dan menyenangkan, serta melalui beberapa pola penerapannya, antara lain: menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, tujuan belajar didefinisikan secara jelas, keberpihakan terhadap siswa, manajemen kelas secara efektif, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, penerapan kebijakan merdeka belajar juga harus dilaksanakan dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh guru sebelumnya. Perencanaan yang harus dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung dirumuskan sebagai berikut :

- a) Sebelum proses pembelajaran berlangsung, maka guru harus memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu
- b) Melakukan kegiatan absensi siswa
- c) Menyampaikan tujuannya dan manfaat pembelajaran yang akan dilakukan
- d) Memberikan garis besar materi yang akan disampaikan
- e) Menyiapkan alat dan bahan untuk proses pembelajarannya.

Kemudian, implementasi kebijakan merdeka belajar tersebut juga harus dilaksanakan dengan meningkatkan kreativitas siswanya. Hal tersebut dipengaruhi beberapa aspek, berikut ini:

- 1) Kemampuan siswa dalam berpikir kritis
- 2) Siswa memiliki kepekaan emosi
- 3) Mengasah bakat yang dalam diri siswa
- 4) Meningkatkan daya imajinasi siswa yang tinggi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar pada SD di Kabupaten Bolaang Mangodow Timur sudah dilaksanakan secara baik, dengan melakukan beberapa tahapan-tahapan, seperti: menentukan pola penerapan kebijakannya, melakukan perencanaan pelaksanaan program merdeka belajar, dan meningkatkan kreativitas dari peserta didik itu sendiri.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola penerapan kebijakan merdeka belajar pada SD di

Kabupaten Bolaang Mangodow Timur dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Selain itu, implementasi kebijakan merdeka belajar juga harus dilaksanakan dengan melakukan perencanaan. Serta, harus diikuti dengan peningkatan kreativitas siswanya. Sejauh ini, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan merdeka belajar pada SD di Bolaang Mangodow Timur, seperti: guru belum mampu membuat perencanaan dan model pembelajaran yang tepat, sistem penilaian yang belum pasti, bebasnya proses pembelajaran membuat guru mudah lelah dalam mengatur siswa, adanya siswa yang belum terbiasa, dan banyak siswa yang merasa tertinggal selama proses pembelajaran berlangsung.

Referensi :

- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Gruru dan Pembelejaran*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona VUrys Disease (Covid-19). *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020*, 1-20.
- Manik, H. S. (2022). Tantang Menjadi Guru Matematika Dengan Kurikulum Merdeka Belajar di Masa Pandemi Omicron Covid-19. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 328-332.
- Nawi, R. (2018). Reinventing Givernment dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Universitas Satria Makassar*.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Cetakan ke 8. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Suharjo. (2006). *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Jakarta: Dikti.
- Syukur, B. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pressindo.